MENCARI INDONESIA



DI LAUTAN ONE PIECE

SAMZine Spesial Vol. 1 (17 Agustus 2025)

SAMZINE

Spesial 17-an



Penulis:

- Mochammad Wahyu Ghani
- Budi Rust (Boeing)
- Muhammad Aminullah Thohir
- Valentino S.
- Hikmal Yazid
- Mohammad Rubby Firdaus
- Anang Prayoga

Editor:

- Ivo Trias Julianno

Penata letak dan desain:

- M. Rafli Ilham

DAFTAR ISI

Masyarakat Adat yang Merdeka: Pelajaran dari Jinbe, Pembelot Pemerintah Dunia 1

Mochammad Wahyu Ghani

Merayakan Oligarki 2

Budi Rust (Boeing)

Dari Lulusia hingga Pati, Perjuangan Rakyat Melawan Penguasa Arogan 3

Muhammad Aminullah Thohir

Tanah, Pengetahuan, dan Kekuasaan: Cerita Perlawanan yang Tak Pernah Usai 4

Valentino S.

Ketika Bendera One Piece Lebih Mengancam daripada Koruptor 5

Hikmal Yazid

One Piece, Anarkisme, dan Indonesia: Ketika Bajak Laut Lebih Bijak daripada Pejabat Negara 6

Mohammad Rubby Firdaus

Neo-Mary Geoise: Negara dalam Bayang-bayang Pemerintahan Dunia 7

Anang Prayoga

Masyarakat Adat Yang *Merdeka*

Pelajaran dari Jinbe, Pembelot Pemerintah Dunia



1

Jinbe



Jinbe

Di *One Piece*, Jinbe memilih keluar dari sistem yang menindas kaumnya. Di dunia nyata, masyarakat adat juga menghadapi pilihan yang sama: setia pada negara yang merampas atau membelot demi menyelamatkan tanah dan martabat.

05

Kalau kamu penggemar ***One Piece***, kamu pasti kenal **Jinbe**. *Manusia ikan bermuka serius, berbadan hiu paus, tapi hatinya selembut kapas.*

Walaupun Jinbe tidak se-famous trio monster di kru Topi Jerami, karakter ini bukan karakter yang muncul hanya sekadar figuran. Jinbe bukan pelengkap, Jinbe adalah karakter yang digambarkan sebagai ksatria laut yang sebenarnya, sehingga kita mampu berpikir tentang sistem ketidakadilan dan tentang pilihan untuk taat atau membelot dari sistem yang bikin hidup serasa tidak merdeka.

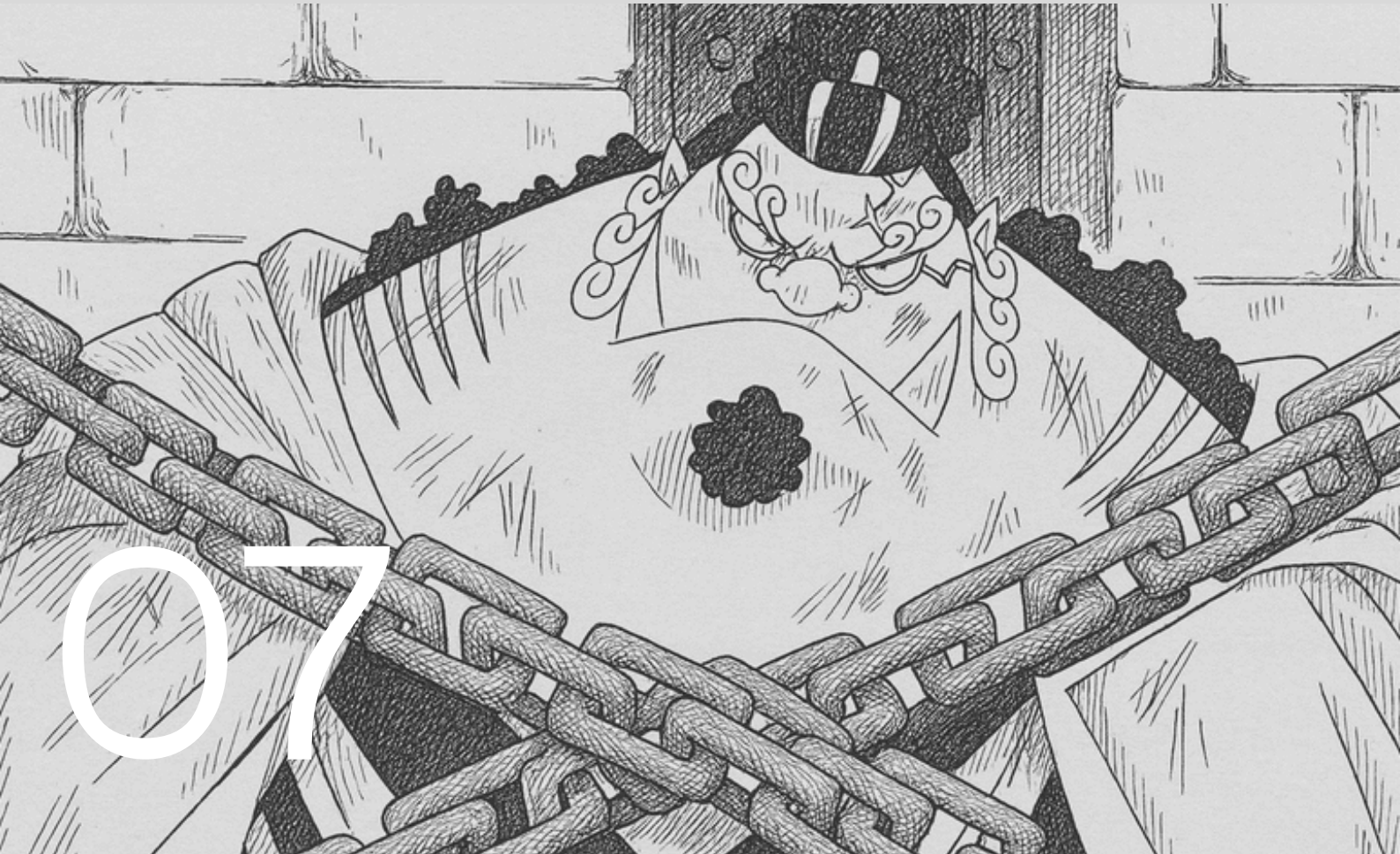
Awalnya, Jinbe adalah bajak laut ‘resmi’ yang disahkan Pemerintah Dunia. Fungsinya sederhana tapi busuk: menjinakkan lawan, memberi stempel legal pada pihak yang seharusnya melawan. Tugasnya seperti jadi satpam di rumah yang hobi merampok tetangga.

Namun Jinbe nyatanya segera tersadar, bahwa dia hanyalah alat untuk memukul orang-orang lemah yang disetir oleh pemerintah dunia. Jinbe tahu sistem itu tidak akan pernah peduli pada kaumnya, para fishman, warga bawah laut yang dianggap ‘kelas dua’ oleh manusia daratan. Mereka dibenci, dilecehkan, bahkan diperdagangkan layaknya budak yang tidak memiliki harga diri.



Puncaknya, ketika Pemerintah Dunia bentrok dengan Shirohige, salah satu dari sedikit manusia yang menganggap fishman setara, Jinbe memilih keluar. Status jabatannya sebagai Shichibukai hilang. Sebuah jabatan yang sangat prestisius karena hanya tujuh kelompok bajak laut terkenal yang diberi hak menjalin aliansi dengan Pemerintah Dunia.

Bukan hanya kehilangan jabatan, tapi Jinbe juga dipenjara dan dimusuhi negara. Namun di situlah ia merdeka: yang membuat dia mengikuti jalan kemerdekaan dari Luffy pimpinan kelompok bajak laut Topi Jerami, pemuda idealis yang tidak pernah tunduk pada sistem busuk. Jinbe diterima bukan karena ototnya, melainkan karena integritasnya.



07

SISTEM YANG MENGAKU 'BAIK'

UNTUK MASYARAKAT ADAT

Cerita Jinbe ini terlalu mirip dengan nasib masyarakat adat di Indonesia. Bedanya, mereka bukan karakter manga. Mereka manusia sungguhan, tinggal di hutan, gunung, hingga pesisir. Wilayah yang sering disebut 'pinggiran', yang nyatanya pejabat rakus tetap saja mengincarnya untuk diolah sebanyak-banyaknya. Pemerintah tidak sadar, dari sanalah pusat kehidupan seharusnya dimulai.

Masyarakat adat ada jauh sebelum republik ini lahir. Mereka punya hukum, tata ruang, bahasa, dan cara hidup sendiri, yang sering kali jauh lebih ramah lingkungan dibanding gaya hidup modern yang kita banggakan. Namun balasan negara? Mereka dicap penghalang pembangunan. Tanah adat diubah menjadi tambang, perkebunan, atau Proyek Strategis Nasional. Melawan berarti dicap 'radikal' atau 'anti kemajuan'.

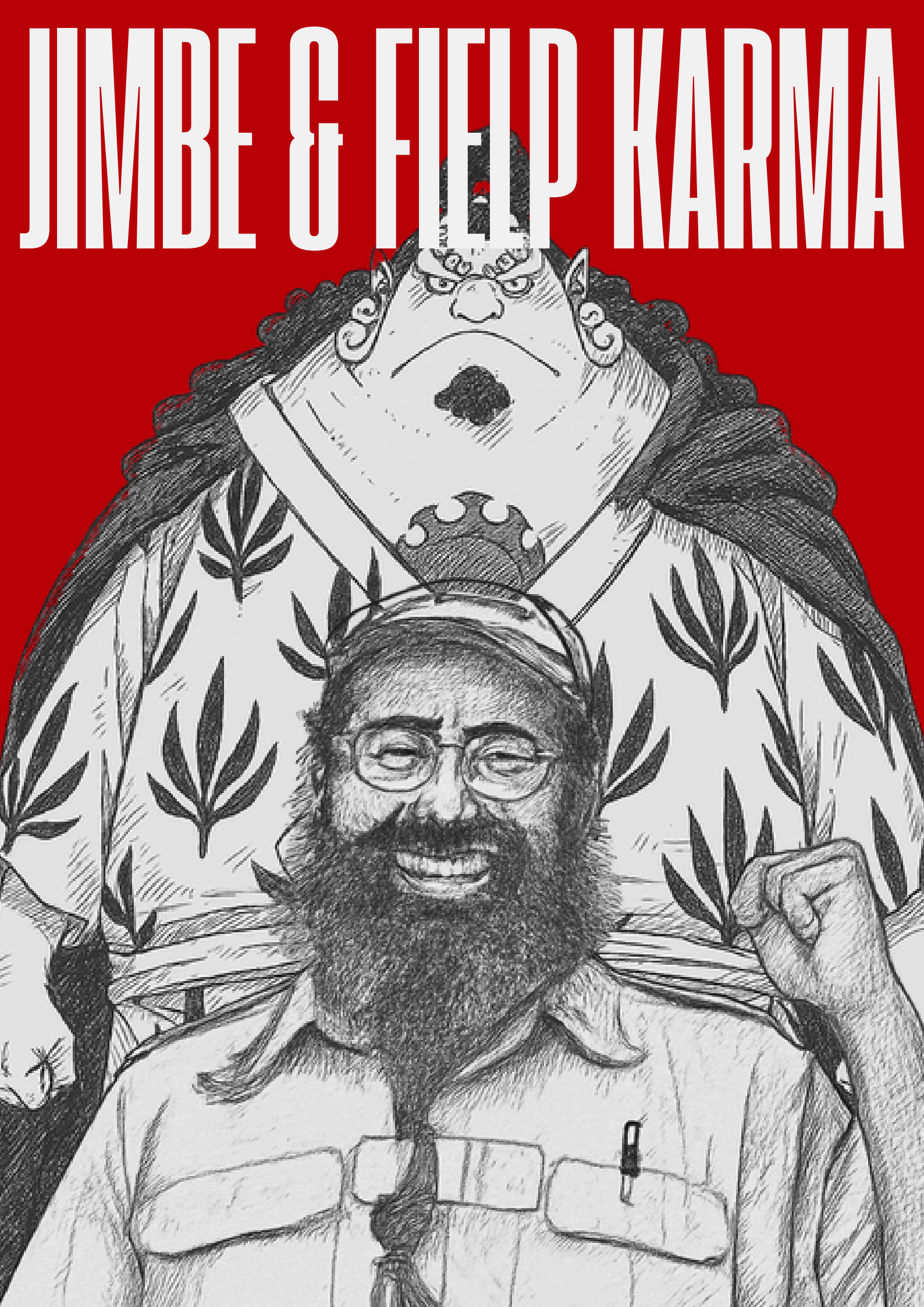
Sama seperti *fishman* di *One Piece*, masyarakat adat di dunia nyata juga memikul stigma bawaan: dianggap kurang pintar, kurang modern, dan kurang layak. Padahal mereka adalah penjaga bumi yang paling konsisten.

“You cannot change the past...”

Jinbe punya satu kutipan yang pantas ditulis di tembok atau dinding DPR:

“You cannot change the past. But you can start where you are and change the ending.”

JIMBE & FIELP KARMA



Kita memang tidak bisa menghapus sejarah panjang perampasan tanah dan diskriminasi. Namun masa depan? Masih bisa, selama ada keberanian untuk memilih jalan berbeda. Itulah yang dilakukan Jinbe. Di dunia nyata di Indonesia, itu jugalah yang dilakukan tokoh adat Papua, Filep Karma.

Dulu dia ‘orang dalam’: pegawai negeri, terdidik, paham birokrasi. Namun ketika sadar sistem yang dia jalani tak berpihak pada bangsanya, dia memilih keluar. Mengangkat bendera Bintang Kejora. Hasilnya? 15 tahun di penjara. Bukan karena senjata, melainkan karena simbol. Bukan karena kekuasaan, melainkan karena martabat. Sama seperti tahun ini, di mana pemerintah bahkan bergulat dengan pemikiran mereka yang dangkal, sehingga melarang bendera *One Piece* berkibar.

Filep Karma dan Jinbe tidak pernah bertemu. Yang satu hidup di dunia fiksi, yang satu pernah hidup di tanah nyata yang terasa lebih kejam dari manga. Namun mereka punya satu kesamaan: mereka tahu kapan saatnya berhenti percaya pada sistem, dan mulai percaya pada rakyatnya sendiri.

PELAJARAN DARI DUNIA FIKSI UNTUK DUNIA NYATA

Kisah Jinbe sebenarnya tentang satu hal: kekuatan sejati adalah keberanian membela komunitas ketika sistem berhenti melakukannya. Masyarakat adat di dunia nyata juga sama. Mereka bukan korban pasif, mereka adalah aktor politik yang sah. Mereka tidak butuh belas kasihan. Mereka butuh pengakuan nyata. Dalam hukum, tanah adat seharusnya menjadi wilayah yang dilindungi, bukan dirampas demi kepentingan pihak luar.

Dalam peta, wilayah adat mestinya diakui keberadaannya, bukan dihapus seolah tak pernah ada. Dalam kebijakan, pembangunan harus melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama, bukan menyingkirkan mereka dari tanah dan kehidupannya. Dalam anggaran negara, dukungan nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari jauh lebih berarti daripada sekadar pemasangan spanduk setiap peringatan Hari Masyarakat Adat.

Kalau dunia fiksi bisa memberi Jinbe ruang untuk berlayar dan membela kaumnya, kenapa dunia nyata tidak bisa memberi ruang yang sama bagi masyarakat adat? Kadang, anime jauh lebih realistis daripada pidato pejabat.

Masyarakat Adat: *Hanya Ingin Hidup Merdeka*



13

Loyal pada rakyat itu kemuliaan. Loyal pada sistem yang menindas itu pengkhianatan. Masyarakat adat yang memilih jalan merdeka mungkin dianggap pembangkang oleh negara, tapi dalam sejarah, merekalah yang akan dikenang sebagai penjaga kehidupan.

Jika kalian menonton *One Piece* lagi dan melihat scene ketika Jinbe berdiri di samping Luffy, ingatlah: di dunia nyata, ada banyak Jinbe yang sedang melawan Pemerintah Dunia versi mereka sendiri.

Bedanya, mereka tak punya kapal *Thousand Sunny*. Namun mereka punya tekad dan itu cukup untuk menyalakan obor kemerdekaan yang seharusnya.

Mochammad Wahyu Ghani
Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN

Merayakan Oligarki



Lazimnya hari ulang tahun, sebagian orang ada yang ingin merayakan, sebagian lagi tidak. Tentunya ada berbagai macam cara untuk merayakan hari kelahiran. Selama bukan tindakan kejahatan atau kriminal, dan tidak pula melanggar norma sosial, biarkan saja mereka merayakan dengan caranya masing-masing. Kita cukup mendoakan yang terbaik tanpa perlu menghakimi.

Lalu, bagaimana jika yang berulang tahun adalah sebuah negara? Sepertinya ini wajib dan mutlak untuk dirayakan, walaupun hingga saat ini saya belum menemukan apa urgensinya. Memoar bagi para pahlawan? Membela martabat bangsa dari penjajah itu kewajiban, bagi saya pribadi, itu tidak membutuhkan validasi. Jangan menyamakan membela martabat bangsa dengan tingkah konyol *influencer* yang sedang pamer keseharian dan liburan.





Namun sudah jelas bahwa opini atau pilihan pribadi tidak bisa diterapkan pada aturan sosial kecuali kita adalah seorang pemimpin. Entah pemimpin keluarga, lingkungan rumah tangga, hingga yang paling besar, pemimpin sebuah negara. Seorang pemimpin, tentunya memiliki idealisme sendiri untuk membentuk atau membangun negaranya. Mari kita mengambil contoh Imu, tokoh dari sebuah cerita fiksi yang akhir-akhir ini ramai menjadi perbincangan di Indonesia, *One Piece*.

Imu merupakan entitas tunggal yang membentuk sejarah dunia baru di cerita *One Piece*. Dia menghapuskan 100 tahun sejarah dunia yang sebelumnya sudah ada, menggantinya dengan sejarah versi baru sesuai kehendaknya dan sudah berjalan selama 800 tahun. Orang-orang seperti Profesor Clover dan penduduk Ohara yang ingin mengungkap sejarah 100 tahun yang hilang, mengalami persekusi hingga di level pembunuhan atas nama ‘keadilan’.

Seperti pernah mendengar kisah ini di dunia nyata?

Nama **Ita Martadinata Haryono** dan **Munir** mungkin bisa menjadi pengingat.





Belum lama ini, menteri kebudayaan Indonesia dikecam banyak pihak karena 'ingin memperbarui sejarah' tapi justru dengan tendensi menghapus sejarah kegelapan yang pernah terjadi di negerinya. Tentu saja para penyintas—yang mengalami kegelapan tersebut—serta TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) meradang.

Sebagai civitas akademika, apa pun hasil dari sebuah riset, sudah sewajarnya diungkapkan ke publik dengan sejujur-jujurnya tanpa ada satu hal pun yang ditutupi. Tujuannya, tentu saja sebagai pembelajaran agar kesalahan-kesalahan di masa lalu tidak terjadi lagi. Kali ini malah terjadi hal sebaliknya karena penguasa yang tidak kompeten memegang kendali.

Lalu, apakah kebijakan Imu berhenti pada pembentukan sejarah baru saja? Tidak. Ia mulai membentuk koalisi palsu yang beranggotakan 20 kerajaan, meski akhirnya diketahui ada 1 kerajaan yang memilih untuk berlepas diri, Kerajaan Alabasta. Pengkhianatan Kerajaan Alabasta berujung pada dibunuhnya Raja Nefertari D. Cobra.

Kerajaan Alabasta, walaupun memiliki kekuasaan sendiri, tapi skalanya berbeda dengan kekuasaan mutlak Imu yang memiliki level di seluruh dunia One Piece. Bagi seseorang dengan level kekuasaan mutlak, orang selain dirinya dan kelompoknya hanya akan dianggap sebagai rakyat biasa. Tidak ada yang bisa dilakukan selain tunduk dan patuh. Pada akhirnya, cara memimpin Imu diterapkan oleh beberapa orang seperti Wapol di Drum Kingdom, Donquixote Doflamingo di Dressrosa, serta Kurozumi Orochi di Wano.







Apa yang terjadi di Drum Kingdom, Dressrosa, dan Wano, bisa dipastikan kita temukan semuanya terjadi di Indonesia. Wapol lari meninggalkan negerinya dan menyelamatkan diri sendiri saat Drum Kingdom diserang oleh Kurohige. Bedanya, Wapol tidak ke Yordania karena dia bukan tokoh nyata.

Walaupun di dunia One Piece terkenal dalam bidang kesehatan, Drum Kingdom juga bermasalah pada isu tersebut. Rakyat miskin dilarang sakit karena dokter-dokter di Drum Kingdom hanya dibolehkan menangani pasien dari lingkungan kerajaan saja. Dokter yang tidak mematuhi perintah raja dan tetap melayani rakyat kelas bawah akan dipersekusi, dikriminalisasi, hingga berujung pada penjara. Sebab itu muncul dokter-dokter seperti dr. Hiluluk dan dr. Kureha.

Bagaimana dengan Dressrosa? Lebih suram lagi. Doflamingo, pemimpin Dressrosa, adalah seorang tenryuubito yang turun tahta menjadi bajak laut, lalu melakukan kudeta pada raja sah saat itu, Riku Doldo III. Pada akhirnya Dressrosa dikuasai oleh seorang mafia dunia bawah tanah. Doflamingo memanipulasi rakyat Dressrosa bahwa negeri mereka damai dan bahagia.

Rakyat yang mengerti kondisi sebenarnya akan berakhir menjadi budak, dihilangkan, dan dilupakan keluarga serta para kerabatnya dengan kekuatan dari Sugar. Doflamingo adalah representasi penguasa yang memanfaatkan ketimpangan sosial dan politik untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, serupa dengan oligarki di negeri sendiri. Eh, apakah Eiichiro Oda terinspirasi dari Indonesia selama 32 tahun?

Yang dilakukan Doflamingo tak jauh berbeda dengan perlakuan Orochi terhadap negeri Wano dan rakyatnya. Di era ke-*shogun*-an keluarga Kozuki, Wano adalah negeri yang damai, indah, dan sejahtera. Sumber daya alam pun melimpah, sehingga rakyat tidak menggantungkan diri pada dunia luar. Memang tidak sepenuhnya, masih ada Kuri yang dianggap sebagai wilayah bromocorah. Namun rakyat masih bisa menikmati keadilan dan tidak kesulitan mencari makan.

Saat terjadi peralihan kekuasaan dari keluarga Kozuki ke Kurozumi, Wano berubah 180 derajat. Orochi memperbudak rakyat Wano dengan kerja paksa untuk membangun pabrik-pabrik dan memproduksi senjata, hingga memberi akses hanya kepada orang-orang kaya di ibu kota Bunga. Belum lagi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari limbah pabrik. Orochi menggandeng bajak laut Beast yang dipimpin Kaido sebagai beking kekuasaan. Siapa saja yang berani melawan Orochi, maka harus berurusan dengan Kaido.

Dan Kaido sebagai pihak luar dari pemerintahan Wano, diberi kekuasaan oleh Orochi untuk mengeruk dan menguras sumber daya Wano, alam dan manusianya. Sebagai catatan, saya tidak sedang membicarakan Freeport. Kerja sama antara Orochi (pemerintah) dengan Kaido (preman) bukan hal rahasia di dunia nyata. Mereka bahkan bisa mendaftarkan diri dengan berkedok sebagai organisasi masyarakat, lengkap dengan surat ijin dan seragam.

Kemiskinan struktural di era kepemimpinan Orochi juga dilanggengkan. Apa itu akses pendidikan dan kesehatan?



Rakyat yang berada di luar ibukota Bunga tidak memiliki akses apa-apa. Tanah dan sumber airnya rusak akibat dari limbah pabrik senjata milik Kaido. Lingkungan tempat mereka tinggal dirusak sedemikian rupa agar mereka tidak mampu menghasilkan suatu apa pun untuk dinikmati dan pada akhirnya, demi bertahan hidup terpaksa menggantungkan diri pada kekuasaan Orochi.

Secara umum, empat tokoh yang saya jadikan analogi memiliki kesamaan, mereka mengekang kebebasan. Baik itu kebebasan berekspresi maupun bersuara. Jika kita cermat membaca *One Piece*, hal-hal yang dilakukan oleh Imu, Wapol, Doflamingo dan Orochi akan sangat mudah ditemukan di Indonesia.

Korupsi, ketimpangan sosial, korupsi, kemakmuran dan kesejahteraan palsu, korupsi, manipulasi sejarah, korupsi, kerusakan lingkungan, korupsi, politik oligarki, korupsi, konflik kelas, korupsi, kebijakan asal-asalan yang kontra dan tidak melibatkan partisipasi rakyat, korupsi, penguasa yang otoriter dan represif serta berbagai macam kebusukan lainnya setelah korupsi.

Membaca manga atau menonton anime sebenarnya perlu sebagai gambaran dari suatu negeri melalui kacamata seni, pun sebagai hiburan dari kepenatan yang hampir setiap hari diciptakan pemerintah untuk menyengsarakan rakyatnya. Juga sebagai pembelajaran bahwa untuk memperjuangkan kebebasan yang bertanggung jawab, melakukan perlawanan dan reformasi terhadap pemerintahan yang korup serta tidak memiliki napas keadilan, maka kita harus siap untuk mempertaruhkan nyawa.

Seperti yang dilakukan para korban Semanggi I dan II, Marsinah, Wiji Thukul, Munir dan Ita Martadinata.

Budi Rust (Boeing)
Freelancer yang juga musisi biasa saja, menyukai dunia tulis-menulis sejak lama.

Dari Lulusia hingga Pati, *Perjuangan Rakyat Melawan Penguasa Arogan*





"Apa yang akan kalian lakukan, sampah? ***Mati atau melawan. Pilihlah takdir kalian.*** *Kalian pikir, pahlawan itu urusan orang lain? Mungkin saja itu kalian."*

Kata-kata tersebut membuat rakyat Kerajaan Lulusia mengangkat tongkat. Tongkat yang dipegang oleh rakyat adalah bentuk semangat mereka untuk berlawan. Hanya dengan tongkat, warga Lulusia memukul dan menangkap bajak laut yang ingin menjarah mereka. Hal tersebut berhasil karena ada sebuah dorongan dan bantuan dari Revolution Army/Pasukan Revolusi. Pasukan Revolusi mendorong rakyat untuk melawan agar kedamaian mereka dapatkan, bukan bergantung kepada orang lain.

Di Indonesia, kemenangan rakyat karena perjuangan bersama sudah terbukti berkali-kali. Revolusi 1945 dari gerakan sporadis hingga modern[2], penolakan Daerah Istimewa Surakarta (DIS)[3], dan Reformasi 1998 berhasil karena perjuangan rakyat[4]. Pasca reformasi, perjuangan rakyat juga terus muncul karena adanya aturan dari rezim yang merugikan rakyat, salah satunya dari rakyat Pati.

Dari Lulusia hingga Pati, keduanya memiliki cerita perlawanan rakyat untuk melawan rezim.

CERITA dari KERAJAAN LULUSIA

Dalam dunia *One Piece* yang mengutamakan pelayaran, harusnya masyarakat kota pelabuhan memiliki kemakmuran.

Namun, yang terjadi di kota pelabuhan Kerajaan Lulusia berkata lain. Rakyat diharuskan membayar upeti ke kerajaan secara rutin. Apabila tidak sanggup membayar, maka rakyat akan dibunuh.

Hal ini membuat rakyat kota pelabuhan di Kerajaan Lulusia berada dalam kondisi kemiskinan.

Dalam Episode 880 juga digambarkan bahwa masih banyak rumah yang menggunakan kayu dan rakyatnya yang mayoritas perawakannya kurus. Moda, salah satu rakyat Kerajaan Lulusia, juga menyebutkan bahwa hidup rakyat di Kerajaan Lulusia sudah serba kekurangan.

Walaupun sudah membayar upeti ke kerajaan, rakyat di Kerajaan Lulusia tidak mendapatkan jaminan keamanan. Pada saat pertemuan seluruh raja dari berbagai kerjaan, seluruh pasukan elit dibawa oleh keluarga raja untuk mengawal. Angkatan Laut sebagai pelindung rakyat juga tidak memberikan pasukan yang kuat untuk melindungi rakyat Lulusia.





Padahal Kerajaan Lulusia dekat dengan salah satu markas Angkatan Laut, yaitu G-2. Hal ini mengakibatkan perlindungan Angkatan Laut yang diisi oleh pasukan lemah gampang dikalahkan oleh bajak laut ketika Kerajaan Lulusia kosong tanpa pengamanan kerajaan. Raja dari Lulusia hanya peduli dengan upeti rakyatnya, tanpa memberikan hak jaminan keamanan.

Rakyat kota pelabuhan Kerajaan Lulusia akhirnya melawan. Di tengah keputusasaan rakyat ketika diserang bajak laut, Pasukan Revolusi datang membantu. Melalui salah satu petinggi Pasukan Revolusi, Belo Betty, kelompok tersebut mendorong dan memberikan semangat kepada rakyat untuk melawan bajak laut. Ketika mengangkat tongkat sebagai senjata dan melawan, rakyat juga dibantu oleh beberapa petinggi Pasukan Revolusi dengan menghancurkan dan mencuri senjata bajak laut.

Rakyat dapat membungkam para bajak laut dengan kekuatan mereka tanpa menyerahkan seluruhnya ke Pasukan Revolusi. Perjuangan rakyat berlanjut, Raja Lulusia dimasukan ke penjara untuk mengakui dosa-dosanya setelah pulang dari Reverie. Rakyat marah dengan Raja karena tidak memikirkan rakyatnya. Walaupun sudah dipenjara, Raja Lulusia sangat arogan terhadap rakyatnya bahkan mengakui bahwa untuk apa memikirkan rakyatnya. Ia justru mengancam mereka dengan kekuatan Angkatan Laut.

Namun, perjuangan rakyat Kerajaan Lulusia terpaksa terhenti. Pulau mereka diserang oleh penguasa dunia sesungguhnya menggunakan kekuatan militer yang canggih, yaitu mother flame. Akibatnya pulau Lulusia hilang dalam peta dunia *One Piece*. Raja Lulusia juga terkena serangan tersebut. Perlawanan rakyat Lulusia yang berhasil menumbangkan rajanya, terpaksa terhenti karena kekuatan yang lebih besar, yaitu World Government, Kaum Naga Langit, dan Imu.

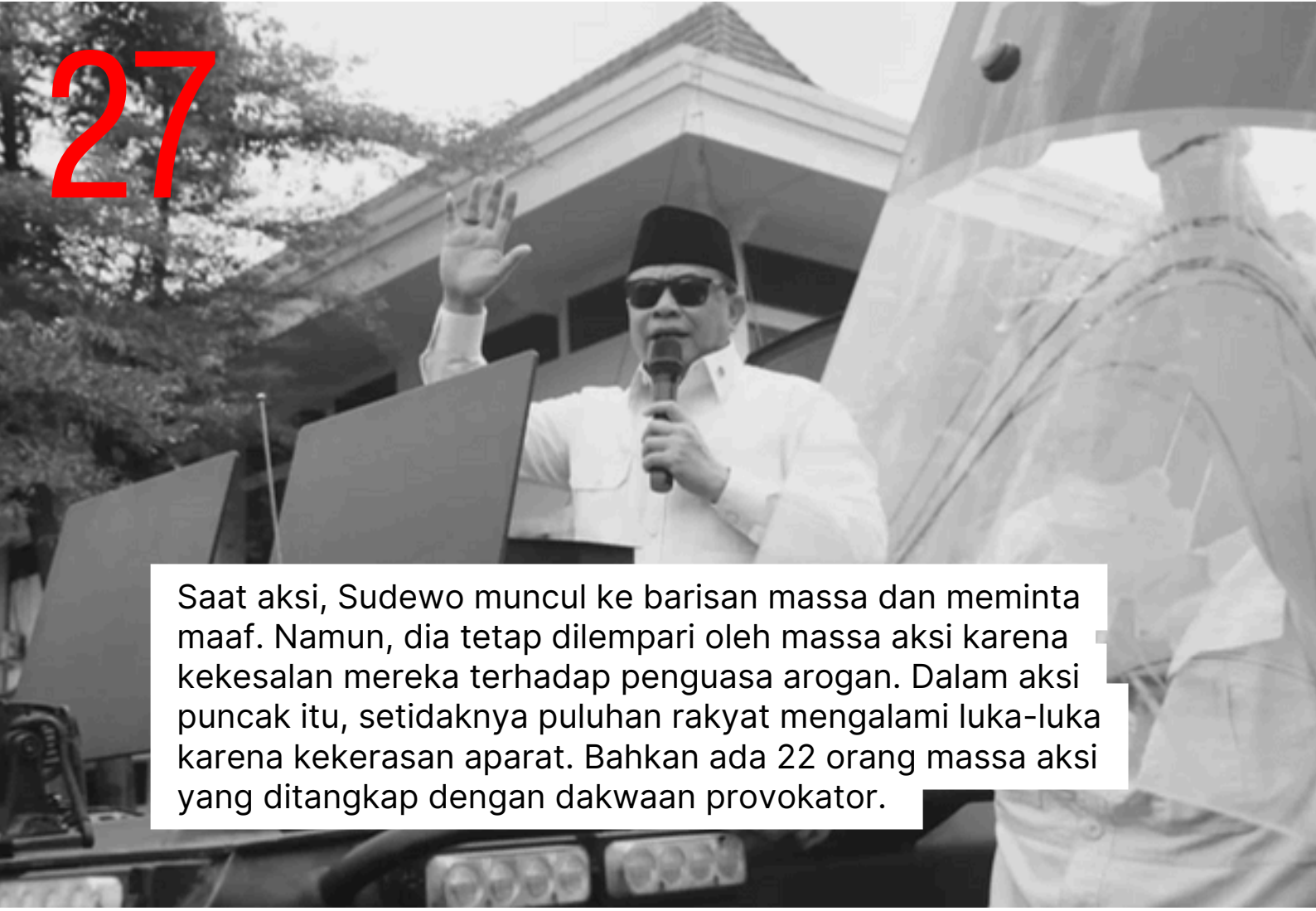


CERITA dari KABUPATEN PATI



(PBB-P2) sebesar 250% di Mei 2025. Hal ini diperparah dengan Bupati Pati, Sudewo yang menantang rakyat untuk demo apabila menolak kenaikan PBB-P2 dan juga menyita barang donasi yang digunakan untuk aksi puncak di 13 Agustus 2025. Setelah ditekan oleh kekuatan solidaritas rakyat, Sudewo pun membatalkan kenaikan PBB-P2 dan mengembalikannya ke tarif awal pada 8 Agustus.

Namun, rakyat Pati terlanjur marah. Aksi puncak tetap digelar untuk menuntut diturunkannya Sudewo dari jabatan bupati. Banyak logistik yang dikumpulkan untuk mendukung demo tersebut di titik aksi. Untuk mengatasi aksi tersebut, rezim membawa 2.684 personel gabungan dari 14 polres yang ada di Jawa Tengah ke Kabupaten Pati.



Saat aksi, Sudewo muncul ke barisan massa dan meminta maaf. Namun, dia tetap dilempari oleh massa aksi karena kekesalan mereka terhadap penguasa arogan. Dalam aksi puncak itu, setidaknya puluhan rakyat mengalami luka-luka karena kekerasan aparat. Bahkan ada 22 orang massa aksi yang ditangkap dengan dakwaan provokator.



Rakyat Pati dihadapkan dengan represi oleh aparat keamanan. Meski begitu, hal ini membuahkan kemenangan kecil, yaitu dibentuknya Pansus pemakzulan Bupati Pati oleh DPRD Pati.

Rakyat, Kekerasan, dan Siapa yang Dilawan

Raja Lulusia dan Bupati Pati sama-sama memiliki sifat arogan, seolah rakyat tidak dapat melawan mereka. Kedua penguasa tersebut menantang rakyat yang pada akhirnya membuat rakyat marah dan bersatu melakukan perlawanan. Raja Lulusia ditangkap bersama keluarganya dan diminta untuk mengakui kesalahannya sebagai raja. Bupati Pati dituntut untuk mundur dari jabatannya karena sudah menantang rakyat yang menolak kenaikan PBB-P2. Arogansi penguasa menjadi bumerang bagi mereka ketika rakyat sudah marah dan melawan.

Arogansi penguasa juga kerap didukung kekuatan dari pihak aparatus kekuasaan. Raja Lulusia masih mengancam rakyatnya karena merasa dilindungi oleh Angkatan Laut yang memiliki kekuatan tempur. Bupati Pati yang didemo rakyatnya pada 13 Agustus 2025 juga langsung dilindungi oleh ribuan personel kepolisian dari berbagai wilayah di Jawa Tengah.

Ketika rakyat melawan, rakyat sering kali terluka. Di Lulusia digambarkan banyak rakyat yang menggunakan perban pasca revolusi. Di Pati banyak warga yang masuk rumah sakit karena kekerasan aparat keamanan terhadap massa aksi. Pendekatan militeristik selalu digunakan untuk melawan rakyat yang melakukan perlawanan untuk menuntut haknya.



Pati

Perlindungan dari militer dan kepolisian menjadi penting untuk menjaga keamanan penguasa. Pihak keamanan dipersenjatai untuk menjaga rezim[5], bahkan dari rakyat yang menuntut haknya. Kerajaan Lulusia dihancurkan sebagai uji coba senjata mother flame untuk melawan musuh penguasa di kemudian hari, baik rakyat, bajak laut, maupun Pasukan Revolusi. Di Pati, kepolisian menggunakan gas air mata, tongkat, hingga tameng untuk memukul massa aksi agar aksi bubar. Kekerasan menjadi senjata rezim untuk memukul rakyatnya.

Dari Lulusia hingga Pati ada hal yang harus dilawan secara bersama. Rakyat Lulusia yang selamat dari serangan mother flame bergabung dengan Pasukan Revolusi untuk melawan World Government, Kaum Naga Langit, dan Imu sebagai kelompok yang membuat rakyat di dunia One Piece mengalami ketidakadilan. Di Indonesia, kenaikan PBB-P2 tidak hanya terjadi di Pati. Di Cirebon kenaikan pajaknya bahkan mencapai 1000%, Kabupaten Semarang 400%, Jombang naik 400%, dan demikian pula yang terjadi di kota-kota lain.

Menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Taufikurahman, kenaikan PBB-P2 terjadi karena lambatnya transfer dari pusat, berkurangnya dana bagi hasil sumber daya alam, dan stagnasi retribusi yang membuat target pendapatan daerah dalam APBD sulit tercapai[6]. Kenaikan PBB-P2 tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, karena ada andil pemerintah pusat yang membuat kenaikan pajak di berbagai daerah.

Lulusia

Perjuangan rakyat menjadi kunci untuk melawan rezim penguasa yang tidak memikirkan rakyatnya. Kekerasan dari aparat keamanan sudah tidak bisa dihindari oleh rakyat yang menuntut haknya. Perjuangan rakyat dimulai dari hal kedaerahan yang akhirnya bisa memicu kesadaran di tingkat nasional.

Lulusia hingga Pati belum memberikan bukti yang kuat untuk memulai perlawanan secara luas karena membutuhkan waktu, tapi dari sana kita telah memiliki pelajaran yang penting: perubahan dimulai dari rakyat, bukan kebaikan hati seseorang.

Muhammad Aminullah Thohir
Peneliti di League of Social Studie & Research (LSSR) dan DPP Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI).

Tanah, Pengetahuan
Dan Kekuasaan
Cerita Perlawanan yang Tak Pernah Usai



Ohara



Pernah dengar soal Ohara? Sebuah pulau di manga *One Piece* yang isinya cuma para cendekiawan. Dosa mereka cuma satu: mencari tahu sejarah yang sengaja dikubur oleh Pemerintah Dunia. Sebab pengetahuan itu bahaya, bisa bikin kekuasaan goyang. Akhirnya? Seluruh pulau dimusnahkan dan dihapus dari peta.

Fantasi? Mungkin. Namun gema cerita ini anehnya terasa dekat. Ingat waktu Orde Baru melarang *Tetralogi Buru* karyanya Pramoedya Ananta Toer pada 1981? Alasannya sama: karya itu dianggap subversif, menyajikan cerita tandingan soal lahirnya bangsa ini dari bawah. Dari perlawanan, bukan dari kebaikan elite. Buku dibungkam karena pengetahuannya dianggap mengancam.

Sekarang, pertarungan itu pindah medium. Bukan lagi di halaman buku, melainkan di atas tanah yang diperebutkan. Di Wadas, rakyat melawan tambang yang mengancam sumber mata air mereka. Di Rempang, masyarakat adat berteriak mempertahankan kampung leluhur dari megaproyek Eco-City. Ini bukan sekadar sengketa. Ini pertarungan soal cerita siapa yang dianggap benar. Pertarungan antara ‘kebenaran’ versi penguasa melawan kebenaran berisi pengalaman dan pengetahuan yang hidup dan bernapas bersama rakyat.

Pistol di Kepala dan Buku di Tangan

Jauh sebelum Wadas dan Rempang jadi berita, Pramoedya sudah menuliskan pertarungan ini lewat tokoh-tokohnya. Ada Minke, anak priyayi yang berhasil masuk sekolah Belanda. Ia rebut senjata paling ampuh milik penjajah: pengetahuan mereka. Namun alih-alih jadi kacung kolonial, ia balikkan senjata itu untuk melawan.

Lalu ada Nyai Ontosoroh. Dijual jadi gundik, posisinya di paling bawah. Namun ia menolak takdir. Ia belajar semua yang bisa ia pelajari, dari bahasa sampai cara mengelola bisnis. Ia ubah dirinya dari objek jadi subjek yang berdaulat atas tanah dan hidupnya. Perlawanan mereka membuktikan satu hal: pertarungan paling fundamental itu ada di kepala, di medan gagasan.





Ini nyambung banget sama pemikiran filsuf Michel Foucault. Buat dia, kekuasaan dan pengetahuan itu sepaket, nggak bisa dipisah (power/knowledge). Kekuasaan modern itu nggak cuma melarang atau menghukum. Justru yang paling efektif adalah yang produktif, yang menciptakan ‘kebenaran’. Caranya? Lewat wacana. Wacana pembangunan, pertumbuhan ekonomi, atau Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah contoh ‘rezim kebenaran’ yang kuat.

Dalam bingkai ini, penggusuran bisa jadi hal yang wajar, cuma ‘harga yang harus dibayar’. Masalah keadilan yang politis diubah jadi sekadar masalah teknis dan hukum. Suara rakyat yang bicara soal sejarah atau mata air? Gampang dicap ‘irasional’ atau ‘ilegal’.

Wadas

Saat Mata Air Lebih Berharga dari Uang Ganti Rugi

Di Wadas, negara nggak datang cuma bawa buldoser. Mereka bawa tiga lapis ‘kebenaran’. Pertama, kebenaran hukum: status PSN Bendungan Bener jadi dalih pengadaan tanah, meski menambang itu sendiri abu-abu dalam UU ‘kepentingan umum’. Kedua, kebenaran ilmiah: dokumen AMDAL yang katanya objektif, padahal rakyat merasa nggak pernah benar-benar dilibatkan. Ketiga, kebenaran ekonomi: pengorbanan satu desa dianggap wajar demi ketahanan pangan nasional.

Rakyat melawan pakai pengetahuan mereka sendiri, pengetahuan yang lahir dari keringat dan tanah yang mereka pijak. Mereka tahu persis ada 28 titik mata air yang bakal mati kalau gunung mereka dikeruk. Ini pengetahuan ekologis yang nggak ada di laporan teknis. Mereka juga bisa hitung kalau hasil kebun durian dan cengkeh mereka setahun bisa miliaran rupiah. Ini pengetahuan ekonomi alternatif yang bikin kata ‘ganti rugi’ terdengar konyol.

Namun saat pengetahuan rakyat makin kuat, aparat datang. Dan ketika intimidasi nggak cukup, jurus terakhir dipakai: kooptasi. Uang ganti rugi miliaran disodorkan ke individu, meretakkan perlawanan kolektif. Solidaritas digerus, diubah jadi kalkulasi untung-rugi perorangan.

Rempang

Dicap 'Liar' di Tanah Sendiri

Di Rempang, permainannya lebih kasar. Megaproyek Eco-City dibungkus citra modern dan hijau. Namun senjata utamanya adalah hukum formal yang kaku. Sebab nggak punya sertifikat tanah modern, 16 kampung tua yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu gampang saja dicap 'warga liar'. Ini cara paling brutal untuk menghapus sejarah. Dengan cap itu, negara seolah punya hak untuk 'menata' mereka, bukan lagi bernegosiasi sebagai sesama warga negara. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik BP Batam jadi lebih sakti daripada sejarah ratusan tahun.

Perlawanan mereka datang dari akar yang dalam: pengetahuan sejarah dan leluhur. Mereka tidak bicara sertifikat, tapi hak ulayat dan jejak kampung sejak 1834. Menolak relokasi bukan soal pindah rumah, melainkan menolak identitas mereka dihapus. Mereka, para nelayan, juga punya pengetahuan ekonomi sendiri. Mereka tahu persis reklamasi dan pabrik akan membunuh laut, sumber hidup mereka. Saat bentrok pecah dan gas air mata menyasar sekolah, itu bukan lagi soal tanah, melainkan soal kemanusiaan yang diinjak-injak.

Perlawanan yang Tak Akan Pernah Selesai

Wadas dan Rempang itu bukan dua kasus yang berbeda. Keduanya adalah babak dalam cerita yang sama. Cerita tentang bagaimana ‘kebenaran’ versi penguasa—entah itu lewat dokumen AMDAL atau cap ‘warga liar’—dipakai untuk menyingkirkan pengetahuan dan kehidupan rakyat. Ini adalah gema dari apa yang diperjuangkan Minke dan Nyai Ontosoroh seabad lalu.

Solusinya jelas bukan cuma uang ganti rugi atau rapat formalitas. Yang kita butuhkan adalah keadilan epistemik: sebuah keadilan di mana pengetahuan warga, cerita leluhur, dan hitung-hitungan ekologis mereka didengar dan dihargai setara dengan data teknokratis.

Perjuangan di Wadas dan Rempang, pada akhirnya, adalah perjuangan untuk memastikan bahwa suara mereka tidak hilang ditelan narasi tunggal kekuasaan. Perjuangan untuk tetap menjadi manusia yang punya cerita, punya akar, dan punya hak atas tanah airnya. Dan perjuangan itu, seperti yang diajarkan Pramoedya, belum dan tidak akan pernah selesai.

Valentino S.
Mahasiswa Sastra Indonesia, Sanata Dharma. Menulis untuk teriak dalam bungkam.

Ketika Bendera *One Piece* Lebih Mengancam daripada Koruptor



5



Di tengah hiruk-pikuk politik dan debat pemindahan ibu kota, negara bernama Indonesia dihebohkan oleh satu hal yang (mendadak) lebih ‘serius dan berbahaya’: ancaman bendera bajak laut. Ya, bendera hitam dengan lambang tengkorak khas anime *One Piece* mendadak jadi "ancaman negara".

Bahkan viral di media sosial, segala warna aparatur negara menyatakan siap memidanakan sang pengibar bendera fiksi tersebut karena dianggap menyimbolkan makar. Sayangnya, yang mereka lupa atau jangan-jangan memang tak mau mencari tahu adalah: bendera ini bukan manifesto pemberontakan, melainkan properti budaya pop.



Pasal yang kerap dikutip oleh pihak-pihak ‘panik massal’ ini adalah Pasal 154 KUHP yang mengatur penyebaran kebencian terhadap pemerintah yang sah. Namun, apakah benar penggemar Luffy yang mengibarkan bendera Straw Hat Pirates pantas dicurigai hendak menggulingkan negara? Logika hukum dan rasa waras sepertinya sedang cuti bersama di konteks ini.

Lalu muncul pertanyaan yang lebih serius: apakah negara ini benar-benar layak disebut kuat, apabila hanya dengan sehelai kain bergambar tengkorak saja struktur rezimnya bisa merasa goyah? Kalau bendera bajak laut kini telah dipersepsikan negara menjadi alat makar, maka penggemar anime-anime lain mesti hati-hati juga, siapa tahu *cosplay* Naruto pun nantinya dikira hendak melakukan kudeta dengan jurus Rasengan. Lucunya, di saat yang sama, bendera korupsi terus berkibar bebas di lembaga-lembaga negara. Namun sayang, fenomena itu tak pernah sekalipun dianggap cukup mengganggu hingga layak untuk dibakar.

Ironis memang. Negara yang katanya demokratis, tempat kreativitas dan kebebasan berekspresi dijunjung tinggi, justru ketar-ketir oleh simbol-simbol fiksi. Kita hidup di era yang perdebatan soal pajak digital, kemiskinan struktural berkepanjangan, hingga rusaknya sistem pendidikan bisa dikalahkan oleh drama soal pengibaran bendera anime. Ini bukan semata kegagalan memahami konteks budaya pop, tapi cerminan ketidakdewasaan birokrasi negara dalam membaca aspirasi generasi muda hari ini.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan pola pikir paranoid yang sudah mendarah daging. Segala bentuk ekspresi yang tak familiar di mata otoritas selalu saja tanpa pikir panjang dianggap ‘mengancam.’ Padahal justru dari sanalah kritik sosial yang jujur dan segar bisa muncul. Ketika penggemar *One Piece* mengibarkan bendera itu, bisa jadi mereka sedang menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan, dengan cara damai dan lebih kreatif. Namun alih-alih semua kreativitas itu didengar, mereka malah berakhir dengan dikecam dan diintai!

Bandingkan dengan kasus nyata, seperti korupsi berjamaah, penyelewengan kekuasaan, hingga pelemahan lembaga hukum. Semua itu justru sering ditanggapi dengan adem ayem, persis watak welas asih yang konon jadi karakter bangsa ini. Di kasus-kasus yang justru lebih mengancam, kita malah tak ada menemukan kehebohan aparat, bahkan tak ada wacana pidana massal.

Malahan ada yang duduk manis di kursi kekuasaan, mengatur ulang sistem hukum, sembari tersenyum di depan kamera. Maka wajar kalau publik bertanya: siapa sebenarnya yang paling berbahaya, pecinta anime atau politisi yang lihai memainkan pasal-pasal?

Kita hidup di negeri yang seolah terbalik. Di satu sisi, negara bisa begitu sigap terhadap hal-hal simbolik, seperti bendera, poster, kaus, bahkan sekadar stiker. Namun di sisi lain, kebijakan yang nyata-nyata merugikan rakyat malah luput dari sorotan. Di tengah inflasi yang menghimpit, mahalnya pendidikan, dan akses kesehatan yang timpang, negara lebih sibuk jadi polisi moral dan ahli estetika.

Lalu muncullah tafsir-tafsir keagamaan dan kebangsaan yang dipaksa menyatu dengan tafsir tunggal kekuasaan. Bendera anime? Haram, katanya. Simbol bajak laut? Ancaman NKRI, tegasnya. Namun ketika rakyat mempertanyakan utang luar negeri, monopoli pangan, atau kenapa APBN selalu bocor entah ke mana; jawabannya kabur, datar, atau malah dibumbui dengan jargon nasionalisme setengah matang. Seolah-olah mencintai negeri ini berarti diam, patuh, dan tidak usah cerewet.



Jika begini terus, kita bukan sedang membangun negara hukum, melainkan negara yang dikuasai tafsir tunggal dan rasa takut. Rakyatnya dicekoki narasi ‘stabilitas’, padahal yang sedang terjadi adalah normalisasi pembungkaman. Dan yang paling menyedihkan? Ketika para pemuda mulai melek politik melalui jalur nonkonvensional, seperti lewat mim, anime, musik indie, atau stand-up, negara malah tak punya ruang dialog. Yang ada cuma vonis dan cap negatif.

Padahal, justru di ruang-ruang kreatif itulah anak muda belajar mencintai negeri ini dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak memakai jargon usang atau pidato kaku, tapi lewat satire, kritik jenaka, bahkan parodi. Sebab mereka sadar bahwa cinta yang jujur itu bukan membenarkan yang salah, melainkan berani mengatakan yang benar meski berisiko.

Gus Dur pernah bilang, ***“negara tak boleh kalah oleh ormas.”*** Namun sekarang, negara justru seperti berkongsi dengan ormas tertentu, membiarkan tafsir sempit tumbuh liar. Masjid yang seharusnya menyejukkan, malah jadi panggung politisasi. Di sisi lain, sekolah yang seharusnya mendidik malah menjadi pabrik penghafal slogan dan ruang publik menjadi medan pengawasan, bukan pertukaran pikiran.

Kita butuh fikih kebangsaan yang menyejukkan, yang mengakui perbedaan, bukan menakut-nakuti dengan ancaman ‘kafir’ atau ‘anti-NKRI’. Fikih yang tidak dicetak dari mesin politik kekuasaan, tapi lahir dari kepekaan sosial dan kebijaksanaan ulama yang berpihak pada rakyat kecil. Fikih yang tidak alergi dengan kritik, tidak gagap dengan realitas anak muda yang lebih ekspresif, lebih digital, dan lebih susah dibungkam.



Mengibarkan Jolly Roger, *Menebar Demokrasi?*

Sebuah negara demokratis sejatinya berani dikritik. Robert A. Dahl, salah satu pemikir besar teori demokrasi modern, menekankan bahwa ‘partisipasi efektif’ dan ‘kontrol atas agenda’ adalah dua dari enam pilar demokrasi. Keduanya tak hanya menjamin hak untuk memilih, tetapi juga hak untuk bersuara—meski suara itu terdengar nyeleneh, sarkastik, atau bahkan lewat kibaran bendera bajak laut.

Sayangnya, yang terjadi baru-baru ini menunjukkan sinyal yang berlawanan. Isu pengibaran bendera bajak laut *Jolly Roger* ala *One Piece* di berbagai momen 17-an, termasuk di tiang bendera resmi upacara, menuai reaksi tajam dari aparat dan pejabat. Sejumlah pernyataan menyebut tindakan itu "tidak menghormati lambang negara", bahkan berujung ancaman pidana berdasarkan UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Dalam Pasal 24, disebutkan bahwa setiap orang dilarang merusak, merobek, atau tidak menghormati bendera negara.



Namun tunggu dulu, apakah mengibarkan bendera fiksi, tanpa merusak Merah Putih, pantas dihukum? Apakah negara sedang krisis kepercayaan diri hingga takut pada kain bergambar tengkorak dan dua tulang yang saling bersilang itu? Atau jangan-jangan memang benar bahwa aksi simbolik sebagai wujud protes anak muda itu sungguh menggambarkan keadaan negeri yang sudah seperti ‘kapal tanpa nakhoda’ yang penuh janji kosong, arah tak jelas, dan elite yang saling rebut kemudi?



Dalam demokrasi yang sehat, simbol-simbol alternatif seperti ini justru penting. Mereka adalah cara rakyat bicara di luar kanal formal. Pengibaran bendera bajak laut bisa dibaca bukan sebagai penghinaan, melainkan sebagai sinyal bahwa banyak anak muda merasa tidak lagi terwakili oleh simbol resmi negara. Maka solusinya adalah bukan malah menakut-nakuti dengan pasal pidana, melainkan keberanian pemerintah yang dikritik untuk membuka ruang dialog.

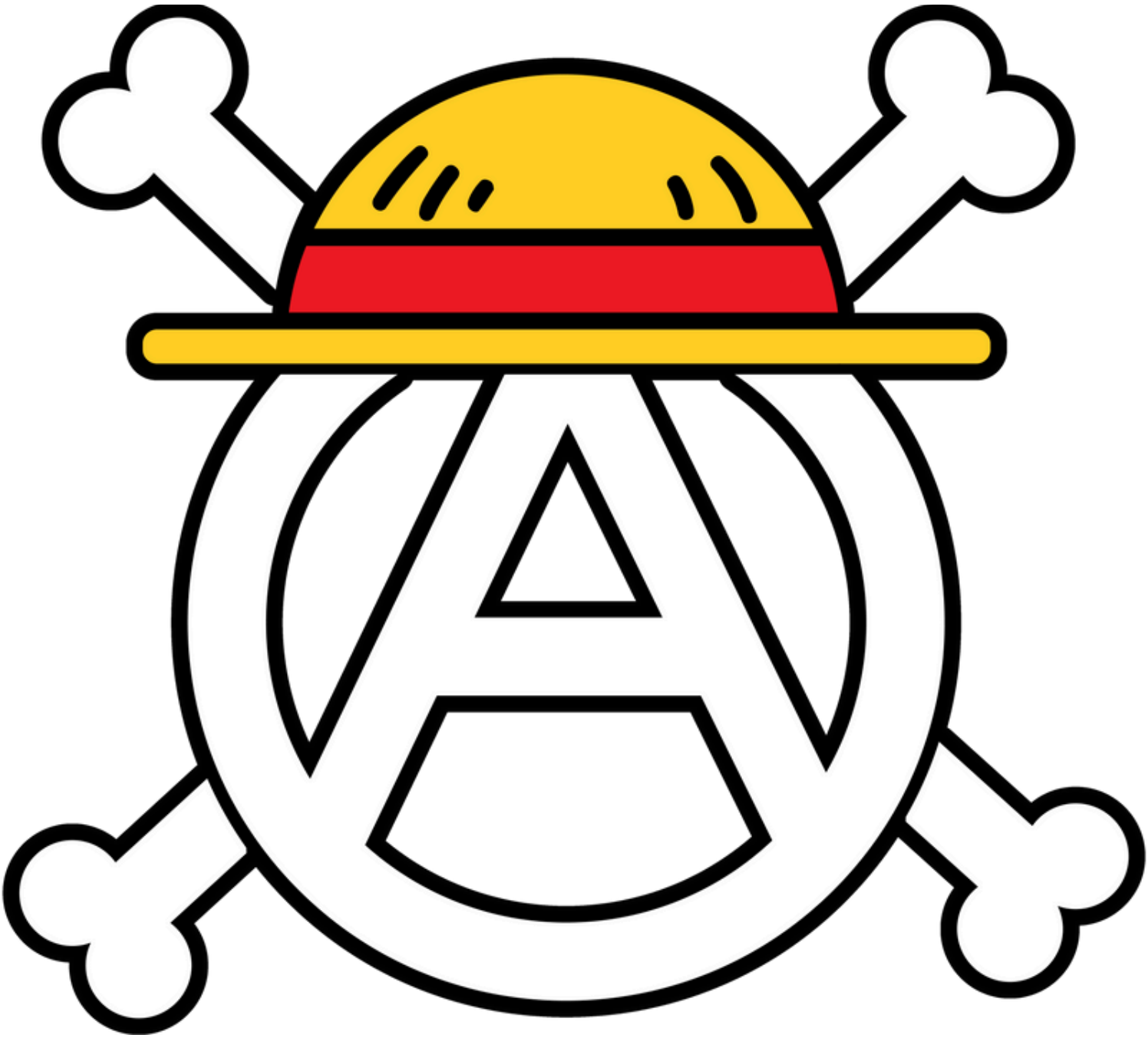
Jika pemerintah mau mendengar dengan jiwa yang demokratis, mungkin akan disadari bahwa *Jolly Roger* bukan musuh negara, melainkan cermin reflektif hari ini. Toh, kita semua tahu, yang kadang takut bercermin biasanya bukan karena cerminnya yang menyeramkan, melainkan karena wajah yang terpantullah yang tidak sesuai harapan.

Hikmal Yazid
Lulusan Sastra Indonesia. Masih mengamalkan ilmu di instansi swasta. Selalu dan gatal kalo tidak menulis dalam sepekan.

One Piece, Anarkisme, dan Indonesia:

Ketika Bajak Laut Lebih Bijak daripada Pejabat Negara

6



Sebelum saya mengenal kisah petualangan Monkey D. Luffy, saya adalah orang yang tidak begitu menyukai anime. Menurut saya anime terlalu penuh fantasi dan sangat jauh dari realitas yang saya alami. Saya ada di posisi suka sama cerita fiksi ini, saat secara tidak sengaja melihat satu unggahan di Instagram. Disitu ditulis, "Anarkisme dalam Serial *One Piece*". Saya pun berhenti scroll. Jujur saya agak kaget. "Hah? Kok bisa? *One Piece* penganut anarkisme? Luffy tu Mikhail Bakunin? Begitulah rasa kaget saya, sampai akhirnya saya kian penasaran dan mulai sedikit mendalami.

Saya sekarang tahu, *One Piece* bukan bajak laut menye-menye yang mencari harta karun. Karya Eiichiro Oda ini adalah bentuk kritik sosial yang disamarkan lewat kisah petualangan para tokoh fiksi.

Kita disuguhkan tentang dunia yang diatur oleh World Government, institusi tirani yang korup dan menindas. Uniknya, yang jadi protagonis justru bajak laut, kelompok yang biasanya dicap sebagai kriminal (perlihat sama bukan dengan anarkisme yang selalu dianggap sebagai biang pelaku kekerasan saat terjadi gesekan). Sementara Angkatan Laut/Marine (ibaratnya aparat) yang seharusnya menjaga perdamaian, tetapi malah bertindak sewenang-wenang.

Di sini saya mulai berpikir bahwa ini bukan sekadar fiksi. *One Piece* merupakan simbol perjuangan sekaligus alat perjuangan. Maka, ketika akhirnya di negeri ini beramai-ramai ingin mengibarkan bendera *Jolly Roger* dari *One Piece*, saya sangat takjub. Saya sadar ini bukan sekadar *fandom*, ini bentuk perlawanan simbolik atas keresahan yang terjadi pada negara ini.



46

Anarkisme
Bukan kekacaun

Banyak orang salah kaprah memaknai anarkisme. Ideologi ini sering kali dianggap dan diidentikkan dengan kekacauan. Padahal dalam konteks sejarahnya, anarkisme merupakan keinginan untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang tanpa dominasi kelas, tanpa otoritas yang menindas, hingga tanpa hierarki yang kaku. Meski demikian, tatanan yang dimaksud bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan hidup yang erat dengan rasa solidaritas, saling bantu, dan kesetaraan antarsesama dalam mengambil keputusan. Sesuatu yang mendominasi dan dianggap sebagai bentuk penindasan adalah seperti yang hari ini dipertontonkan oleh negara.

Monkey D. Luffy adalah contoh nyata dari paham anarkisme. Ia adalah orang yang tidak pernah memerintah secara otoriter. Kapal yang membawanya berlayar bukan didasari oleh ketakutan kru atas kebijakan yang diputuskannya, melainkan karena adanya rasa kepercayaan antarkru. Semua di kapal itu punya peran masing-masing dan semuanya sama-sama saling menghargai. Bagi Luffy, semua orang bebas bermimpi dan menggenapkan mimpi masing-masing. Dia tidak pernah memaksa arah teman-temannya. Bahkan sering kali pula keputusan-keputusan penting justru datang dari teman-temannya (kru bajak lautnya).

Di sinilah letak pentingnya edukasi atas nilai anarkisme yang dengan salah kaprah kadung dicap sebagai biang kekacauan di masyarakat. Semoga kita yang belum memahami apa itu anarkisme, bisa sedikit memahami nilai-nilai tersebut, seperti pentingnya perjuangan untuk mencapai kebebasan, kesetaraan, dan perlawanan total terhadap otoritas yang menindas.

Aliansi

yang Tidak Membentuk Kekuasaan

Saat Luffy mengalahkan Doflamingo, banyak bajak laut lainnya yang ingin menjadikannya pemimpin dari sebuah aliansi besar yang mereka bentuk. Namun, dengan tegas Luffy menolak. Di hadapan mereka, dengan tenang ia berkata, “Kalau suatu saat kami dalam masalah, aku akan berteriak memanggil kalian sekeras yang kubisa! Jadi datanglah pada saat itu! Kita tak harus membuatnya jadi seperti ini, kan?”





Kata-kata itu bukan hanya omon-omon biasa. Kalimat yang dilontarkannya adalah pernyataan sikap politik yang tegas (yang tentu jarang kita dengar di negeri ini). Luffy tidak mau menjadi pusat kekuasaan yang absolut. Dia percaya bahwa ikatan dan kekuasaan tidak harus dibangun dari perjanjian kosong, tetapi dari relasi antarmanusia yang sudah seharusnya diposisikan setara.

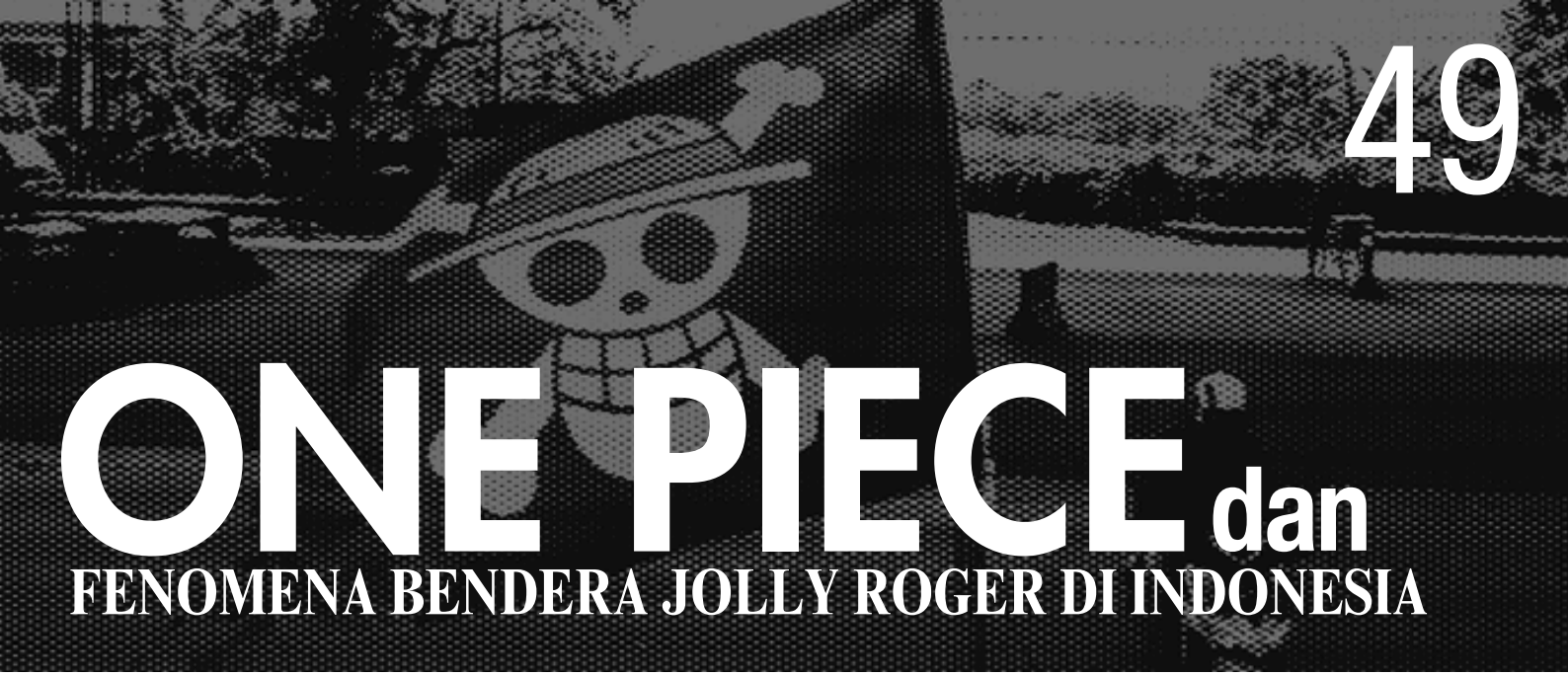
Pierre-Joseph Proudhon, seorang tokoh anarkisme, mengatakan bahwa relasi dari kontrak sosial yang hadir hanya berdasar pada motif ekonomi atau intrik tertentu. Maka, pembatasan terhadap solidaritas sosial, bahkan kontrak sosial sebagaimana yang tercermin dalam sistem negara sering kali dilakukan untuk menunjang kepentingan elite yang justru membungkam solidaritas yang sejati. Dalam *One Piece,* Luffy secara tegas menolaknya.

Konsep *Keadilan* yang Tidak Tunggal

Satu hal yang kuat dari anime ini adalah bahwa tidak ada satu bentuk keadilan yang tunggal. Marine (kelompok Angkatan Laut di *One Piece*) punya konsep 'keadilan mutlak' (*absolute justice*) dan dengan konsep itulah mereka punya legitimasi untuk dengan beringas membantai masyarakat lemah, menghabisi sebuah desa, hingga menghapus sejarah yang sebenarnya. Sikap Marine tentu sangat berbeda dengan Luffy. Dia digambarkan punya karakter keadilannya sendiri. Bersama anggota bajak lautnya, mereka tak pikir panjang untuk membela yang lemah dan melawan penindasan para penguasa. Namun, sekali lagi, tanpa pernah merasa bahwa apa yang dilakukannya membuatnya merasa sebagai seorang pahlawan.

Di sinilah letak perlawanan yang paling keras dari anime *One Piece*. Di sepanjang *arc* (babak pertarungan/perlawanan), kita disuguhkan banyak rentetan peristiwa keji yang menggambarkan bahwa negara dan sistem di dalamnya adalah pusat dari penindasan dan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Tenryuubito yang digambarkan sebagai kaum bangsawan adalah representasi elite penguasa (lokal-global) yang tidak tersentuh hukum. Dalam anime, para Tenryuubito sangat tega untuk memperbudak dan menindas yang lemah, dan paling memilukannya adalah para Marine serta aparatus kekuasaan lainnya justru menjadi pelindung garda depan mereka.

Sejauh ini, Luffy memang tidak pernah terang-terangan menunjukkan hasratnya untuk menjatuhkan pemerintah. Ia adalah bentuk anarkis pasif yang hanya bertindak ketika ketidakadilan yang disebabkan otoritas kekuasaan menyentuh ranah pribadinya.



ONE PIECE dan FENOMENA BENDERA JOLLY ROGER DI INDONESIA

Bukan hal aneh jika belakangan ini makin banyak konten viral soal *One Piece*. Terlebih jika itu dikaitkan dengan isu sosial-politik yang terjadi di Indonesia. Salah satunya tampak dari kabar tentang seruan pengibaran bendera *Jolly Roger* di Indonesia pada hari kemerdekaan yang ke-80. Hal itu bahkan dianggap sebagai sebuah provokasi oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dia bahkan menduga ada gerakan sistematis yang ingin memecah-belah bangsa di balik aksi pengibaran tersebut. Lucunya lagi, aparat keamanan sampai dikerahkan negara untuk mengatasi hal ini.

Saya sangat tergelitik menyaksikan respons kepanikan penguasa. Menurut saya, bendera *Jolly Roger* merupakan simbol yang terasa lebih jujur dibanding harus mengibarkan sesuatu yang rasanya tak patut untuk hari ini dikibarkan. Sebab, kebijakan-kebijakan buruk pemerintah menyebabkan terjadinya banyak permasalahan di seantero negeri ini yang hingga hari ini pun belum terbenahi. Artinya, aksi pengibaran bendera *One Piece* adalah satu simbol dan bentuk perlawanan rakyat. Sebuah pernyataan sikap yang tegas terhadap kesemena-menaan penguasa.

Dari apa yang terjadi di Indonesia beberapa hari belakangan, saya menjadi semakin yakin bahwa meskipun ini merupakan karya fiksi anime, tapi *One Piece* benar-benar menyuarakan apa yang sering kali dirasakan rakyat dunia di bawah kekuasaan tunggal negara. Kita yang mau melawan dan memperjuangkan hak hidup adalah para bajak laut di *One Piece*. Kita bukan kriminal, melainkan orang-orang yang masih harapan untuk menjalani kehidupan yang damai di masa depan.

Mohammad Rubby Firdaus
Penulis & pengamat sosial. Saya adalah Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang tergabung dalam Lembaga Pers Mahasiswa.

Neo-Mary Geoise

Negara dalam Bayang-bayang Pemerintahan Dunia



Dalam semesta *One Piece,* Mary Geoise adalah simbol kemegahan, kekuasaan absolut, dan kepalsuan moral yang dirayakan. Di tempat itu, Kaum Naga Langit tinggal di balik gelembung mewah dan kebal hukum. Mereka tak perlu menjelaskan apa-apa. Cukup lahir dalam garis keturunan yang 'diakui'. Kedengaran asing? Tidak juga.

Dalam konteks negara modern, kita tidak jauh dari sistem Mary Geoise. Kita hanya menggantikan istilah Celestial Dragons dengan elite politik, keluarga dinasti, atau pejabat senior yang sudah lama berkontribusi. Kontribusi pada siapa? Entahlah.
Mungkin pada sistem itu sendiri.

Pemerintah kerap mengklaim bahwa mereka bekerja demi rakyat, tapi rakyat mana? Jika Luffy disebut kriminal karena menentang sistem, maka di dunia nyata, kritik dianggap ujaran kebencian dan kebenaran yang tidak sesuai narasi resmi dianggap hoaks.

Kebebasan bersuara ada, asal tidak menyentuh yang sensitif. Sayangnya, yang sensitif itu justru pusat persoalan: korupsi, kolusi, ketimpangan, penguasa-bersuara-paling-benarlah, dan birokrasi berbau CP0.





Kita menyaksikan skenario *warlord system*, di mana beberapa tokoh lokal dipelihara kekuasaannya, selama tunduk pada pusat. Tak masalah mereka menindas rakyat, asal tidak mengganggu stabilitas politik. Seperti Crocodile di Alabasta atau Doflamingo di Dressrosa. Pemerintah Dunia (atau pemerintah pusat) pura-pura tidak tahu, hingga Luffy datang dan membuat keributan.

Namun, di dunia nyata tak ada Luffy. Yang ada justru rakyat kecil yang terlalu sibuk bertahan hidup, hingga tidak sempat bermimpi tentang kebebasan. Media jadi Den Den Mushi yang disensor: mengulang-ulang narasi ‘situasi terkendali’, walau kota hampir tenggelam oleh utang dan kebijakan lucu-lucuan.

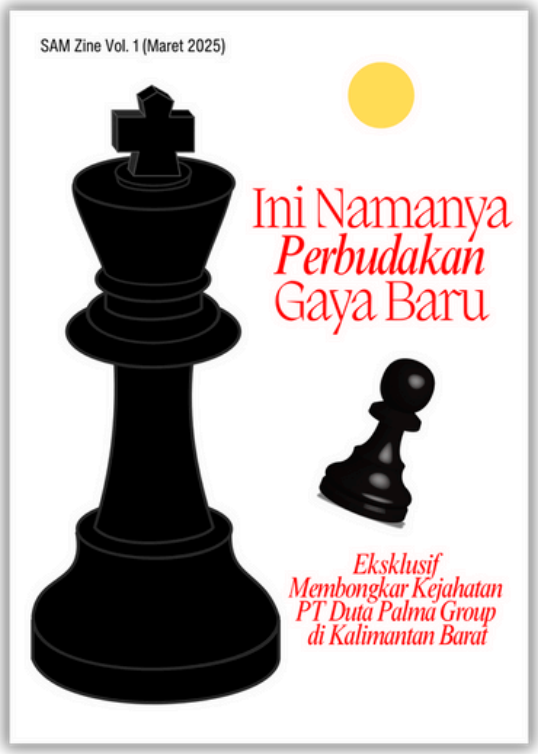
Pendidikan diajarkan seperti sejarah Pemerintah Dunia: glorifikasi, bukan refleksi. Pemberontakan dianggap sebagai masa lalu kelam, bukan bahan evaluasi struktural. Dan di tengah semua itu, mereka yang ingin jadi Nika–pembebas dari penindasan–akan diberi label: pembuat kerusuhan, anti-nasionalisme, atau paling sial didakwa jadi pelanggar UU ITE.

Anang Prayoga
Yang berjalan di antara fakta dan fiksi, sambil mengantongi setengah mimpi dan segenggam realita.



Semutapi

Zine terbitan sebelumnya



Penindasan sistemik buruh PT Duta Palma Group di Kalimantan Barat terus berlangsung—buruh perempuan dilecehkan secara seksual, hak normatif diabaikan, serikat diberangus, dan PHK massal terjadi. Di tengah represi militer dan kriminalisasi aparat, mereka tetap berjuang di Tenda Perjuangan.

Semut Api Media bersama LBH Kalbar telah melakukan liputan mendalam dan merilis zine, yang keuntungannya selama penjualan di tiga bulan pertama disalurkan ke Aliansi Buruh Sambas Bengkayang (ABSB).

Info Selengkapnya:

bit.ly/samzine1

Keterkenalan nama Kartini ini tentu saja tidak bisa dengan naif kita tafsirkan sebagai sebuah proses alami belaka, seolah tak ada tangan-tangan yang bermain dengan kepentingan dan tujuannya masing-masing, tanpa ada agenda tersembunyi sama sekali.

Dalam esai kritik di SalingZineau Vol. 1 (Agustus 2025) ini, Saut Situmorang membawa kita pada sebuah ruang baru untuk melihat bagaimana sosok Kartini dibingkai selama ini oleh berbagai relasi kuasa sejak era kolonial hingga kemerdekaan sebagai representasi dari ‘sosok perempuan yang emansipatoris dan memperjuangkan kaumnya’.

Info Selengkapnya:

semutapi.id/salingzineau



SemutApi



semutapi.id

semutapi.media

penerbitsemutapi

Semut Api

semutapi.id

semutapi_media